

**RINGKASAN EKSEKUTIF**  
**STATISTIK**  
**POLITIK DAN KEAMANAN**  
**DKI JAKARTA**

**2018**

<https://jakarta.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**PROVINSI DKI JAKARTA**

**RINGKASAN EKSEKUTIF  
STATISTIK  
POLITIK DAN KEAMANAN  
DKI JAKARTA**

**2018**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN DKI JAKARTA 2018**

**No. ISBN** : -  
**No. Publikasi** : 31520.1906  
**Katalog BPS** : 4601001.31  
**Ukuran Buku** : B5 (18,2 cm x 25,7 cm)  
**Jumlah Halaman** : viii + 19 halaman

**Naskah :**  
Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta

**Penyunting :**  
Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta

**Desain Kover Oleh :**  
Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta

**Penerbit :**  
© BPS Provinsi DKI Jakarta

**Pencetak :**  
BPS Provinsi DKI Jakarta

**Sumber Ilustrasi : -**

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

# KATA PENGANTAR

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai instansi pemerintah sesuai dengan Undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan akan data bagi pemerintah dan juga masyarakat. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pengguna data secara khusus data terkait politik dan keamanan, BPS Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menyajikan kedua jenis data tersebut dalam bentuk Executive Summary Statistik Politik dan Keamanan DKI Jakarta 2018.

Publikasi ini berisi kajian tentang tentang hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 dan data tentang keamanan. Data-data tersebut merupakan hasil pengumpulan data sekunder yang bersumber dari beberapa instansi seperti Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kepolisian Daerah.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan data dan penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan publikasi ini.

Jakarta, Oktober 2019  
Badan Pusat Statistik  
Provinsi DKI Jakarta  
Kepala,



BUYUNG AIRLANGGA

# DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Jenis dan Sumber Data.....	2
1.4. Sistematika Penulisan.....	2
BAB II. POLITIK.....	3
2.1. Sistem Pemerintahan.....	3
2.2. Pemilihan Kepala Daerah.....	4
2.2.1. Partisipasi Pemilih ( <i>Voters Turn Out</i> ).....	4
2.2.2. Hasil Pemilukada.....	6
2.3. Perkembangan Demokrasi.....	8
2.3.1. Perkembangan Demokrasi 2009 – 2018.....	8
A. Perkembangan IDI Provinsi DKI Jakarta.....	9
B. Perkembangan Aspek IDI.....	10
C. Perkembangan Indeks Variabel IDI.....	11
2.3.2. Lembaga demokrasi.....	12

A. Partai Politik.....	12
B. DPRD .....	12
BAB III. KEAMANAN.....	14
3.1. Tindak Kejahatan.....	14
3.1.1. Sumber Data Kepolisian.....	14
3.1.2. Sumber Data Podes.....	16
3.2. Korban Kejahatan (Susenas).....	17
3.3. Konflik/ Perkelahian Massal.....	18
BAB IV. PENUTUP.....	19

# DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1 Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017.....	6
Tabel 2.2 Jumlah Perolehan Suara dalam Pilgub 2017 Putaran Pertama.....	7
Tabel 2.3 Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Tidak Menggunakan hak Pilih dalam Pilgub 2017 Putaran Kedua.....	7
Tabel 3.1 Lima Jenis Tindak Kejahatan yang yang Paling banyak Tercatat, Tahun 2018.....	16
Tabel 3.2 Banyaknya Kelurahan yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal dan Kecenderungan Kategori Korban, Tahun 2018.....	18

# DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1	Tingkat Partisipasi Pemilih di DKI Jakarta (%)..... 5
Gambar 2.2	Perkembangan IDI Provinsi DKI Jakarta, 2009 - 2018..... 10
Gambar 2.3	Perkembangan Aspek IDI, 2009-2018..... 10
Gambar 2.4	Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi DKI Jakarta, 2017-2018..... 12
Gambar 2.5	Persentase Anggota DPRD Provinsi menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin, Tahun 2017..... 13
Gambar 3.1	Jumlah Kejahatan yang tercatat, Tahun 2016-2018.. 15
Gambar 3.2	Jumlah Tindak Kejahatan di Kelurahan yang tercatat, Tahun 2018..... 16
Gambar 3.3	Persentase Jenis Kelamin Korban Kejahatan menurut Tindak Kejahatan, Tahun 2018..... 17





## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Ukuran kemajuan pembangunan suatu negara dewasa ini tidak lagi hanya diukur pada kemajuan pembangunan ekonomi tetapi juga mulai menysasar ke persoalan kualitas hidup masyarakatnya salah satunya adalah masyarakat yang aman, damai, dan bersinergi selain terpenuhinya kebutuhan hidup material dan non material. Dalam prosesnya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan juga ditentukan oleh stabilitas kondisi politik dan keamanan. Kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai tanpa situasi politik dan keamanan yang stabil. Demikian pula halnya dengan situasi politik dan keamanan yang stabil tidak akan tercapai tanpa adanya kesejahteraan masyarakat.

Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa “.....Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.....”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan mewujudkan rasa aman warganya. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Sebuah pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera, sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan.

Disisi lain seiring perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin positif, permasalahan politik menjadi sesuatu yang dinamis. Kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berinspirasi, kebebasan berpendapat dan kebebasan menentukan sikap dalam berpolitik telah dirasakan masyarakat. Membaiknya kehidupan berdemokrasi diantaranya tercermin dari dinamika jumlah partai politik peserta pemilu dan sikap penduduk terhadap pemilu.

Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Adakalanya politik mempengaruhi keamanan, atau sebaliknya situasi

keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantau dan monitoring. Ini artinya diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan. Karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan wilayah.

## **1.2. TUJUAN**

Untuk memenuhi permintaan data yang semakin banyak khususnya yang terkait dengan situasi politik dan keamanan, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta menerbitkan publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2018. Output dari kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan antar waktu dan antar wilayah. Informasi ini setidaknya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penentu kebijakan di bidang politik dan keamanan di Provinsi DKI Jakarta.

## **1.3. JENIS DAN SUMBER DATA**

Data bersumber dari instansi terkait seperti Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kepolisian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selain data primer tersebut, hasil PODES2018, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2018 dan penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2018 juga menjadi acuan bagi penulisan publikasi ini.

## **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Publikasi ini terdiri dari empat bab. Pada Bab 1 Pendahuluan, disajikan latar belakang, tujuan, jenis dan sumber data dan sistematika penulisan. Bab 2 tentang politik, yang membahas sistem pemerintahan, pemilihan kepala daerah dan perkembangan demokrasi. Bab 3 tentang keamanan, yang terdiri dari pembahasan tindak kejahatan, korban kejahatan dan konflik/perkelahian massal. Sedangkan Bab 4 berisi penutup.

## BAB II. POLITIK

### 2.1. SISTEM PEMERINTAHAN

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam UU 29/2007.

Provinsi DKI Jakarta juga sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi, memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Gubernur dibantu oleh seorang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) yang harus memperoleh suara lebih dari 50% suara sah. Sedangkan Perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kota/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan. Dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah DKI Jakarta dapat mengusulkan kepada Pemerintah penambahan jumlah dinas, lembaga teknis provinsi serta dinas, dan/atau lembaga teknis daerah baru sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran keuangan daerah.

Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Deputi Gubernur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Deputi diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul gubernur.

## 2.2. PEMILIHAN KEPALA DAERAH

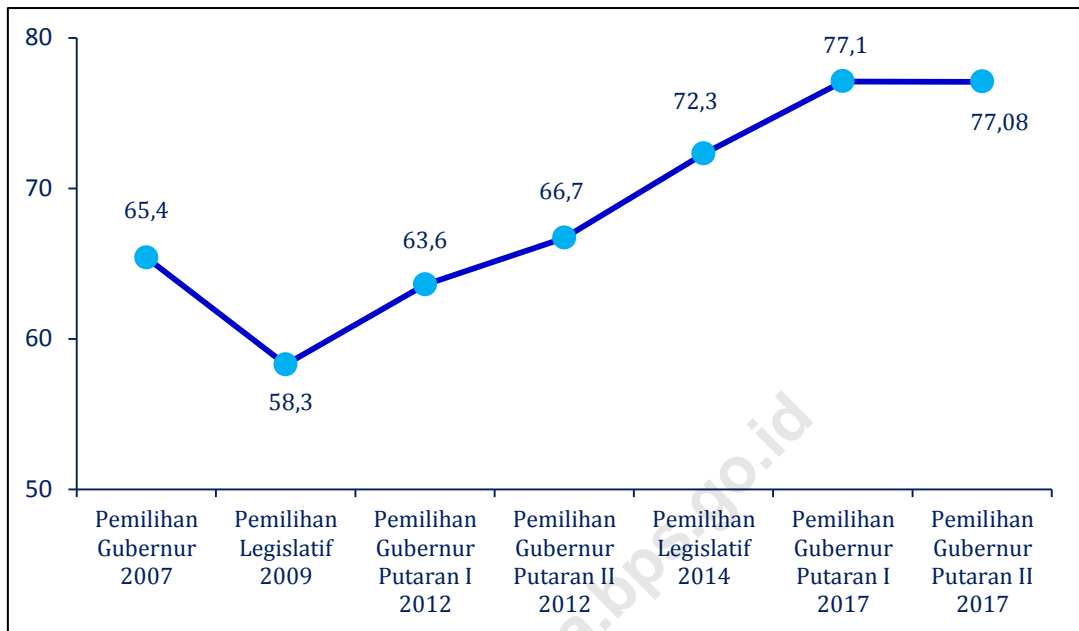
Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat pilkada. Pilkada di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Kemudian disusul diresmikannya Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilukada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-undang nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan demikian, di DKI Jakarta telah tiga kali melakukan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, yaitu pada tahun 2007, 2012 dan 2017.

### 2.2.1. PARTISIPASI PEMILIH (VOTERS TURN OUT)

Pemilu adalah variabel paling mendasar dalam sistem politik demokrasi. Sebuah keniscayaan bagi negara demokrasi untuk menyelenggarakan pemilu secara berkala. Pemerintahan “dari, oleh, dan untuk rakyat” mensyaratkan keterlibatan penuh masyarakat menjalankan pemerintahan dengan pemilu sebagai pintu masuknya.

Secara konseptual, pemilu dirancang sebagai wujud legitimasi masyarakat atas perilaku mereka. Apabila masyarakat cenderung abai dan apatis, maka legitimasi rezim dan kemampuan masyarakat untuk memerintah dirinya sendiri (*to govern themselves*) dapat dipertanyakan. Partisipasi pemilih dalam pemilihan secara langsung dapat dipahami sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan memberikan suara yang sah terhadap pilihannya.

**Gambar 2.1. Tingkat Partisipasi Pemilih di DKI Jakarta (%)**



Sumber : KPUD Provinsi DKI Jakarta

Dalam pemilihan umum di Provinsi DKI Jakarta, sejak tahun 2007, tercatat bahwa pemilihan Gubernur Putaran I Tahun 2017 adalah pemilihan umum dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi, yaitu 77,1 persen. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih paling rendah adalah Pemilihan Legislatif Tahun 2009, sebesar 58,3 persen (seperti terlihat pada Gambar 2.1).

Gambar 2.1. menunjukkan kecenderungan pemilih semakin tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum pada periode tahun 2007 sampai tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta semakin menyadari pentingnya arti suara mereka di balik bilik suara.

**Tabel 2.1. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017**

No	Kab/Kota	Putaran I	Putaran II
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepulauan Seribu	81,4%	80,75%
2.	Jakarta Selatan	75,6%	75,36%
3.	Jakarta Timur	79,3%	78,87%
4.	Jakarta Pusat	76,5%	76,07%
5.	Jakarta Barat	75,2%	76,66%
6.	Jakarta Utara	78,2%	77,56%
Provinsi DKI Jakarta		77,1%	77,08%

Sumber : KPUD Provinsi DKI Jakarta

Pada Tahun 2017, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Putaran, wilayah dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu 81,4 persen di putaran pertama dan 80,75 persen di putaran kedua. Sedangkan wilayah dengan tingkat partisipasi pemilih terendah adalah Kota Jakarta Barat, dengan persentase sebesar 75,2 persen, pada putaran pertama dan Kota Jakarta Selatan dengan persentase sebesar 75,36 persen, pada putaran kedua.

### 2.2.2 HASIL PEMILUKADA

Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 diselenggarakan dua putaran yaitu pada Rabu, 15 Februari 2017 dan Rabu, 19 April 2017. Pilgub tersebut diikuti oleh tiga calon pasangan gubernur dan wakil gubernur. Kandidat pertama adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, kandidat kedua adalah Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, dan kandidat yang ketiga adalah Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Pada putaran pertama perolehan suara dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2. Jumlah Perolehan Suara dalam Pilgub 2017 Putaran Pertama**

No.	Kab/ Kota	Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni	Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat	Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno	Jumlah suara sah seluruh pasangan calon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kep. Seribu	3.891	5.532	4.851	14.274
2.	Jakarta Selatan	177.363	465.524	557.767	1.200.654
3.	Jakarta Timur	309.708	618.880	665.902	1.594.490
4.	Jakarta Pusat	101.744	244.727	222.814	569.285
5.	Jakarta Barat	203.107	613.194	444.743	1.261.044
6.	Jakarta Utara	142.142	416.720	301.256	860.118
Jumlah		937.955	2.364.577	2.197.333	5.499.865

Sumber : KPU Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Undang-undang no 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 11 Ayat (1) : “Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.” Ayat (2) : “Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama”. Sehingga KPU Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan putusan yang menetapkan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 dilaksanakan dua putaran.

**Tabel 2.3. Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Tidak Menggunakan hak Pilih dalam Pilgub 2017 Putaran Kedua**

No	Kab/Kota	Perolehan Suara			Jumlah
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan hak pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kepulauan Seribu	14.187	168	3.511	17.866
2.	Jakarta Selatan	1.214.304	14.057	402.999	1.631.360
3.	Jakarta Timur	1.605.266	18.267	436.596	2.060.129
4.	Jakarta Pusat	576.449	6.395	184.199	767.043
5.	Jakarta Barat	1.296.739	10.995	399.661	1.707.395
6.	Jakarta Utara	884.408	7.833	259.439	1.151.680
Provinsi DKI Jakarta		5.591.353	57.715	1.686.405	7.335.473

Sumber : KPU Provinsi DKI Jakarta



Berdasarkan rekapitulasi tersebut, KPU Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 95/Kpts/KPU-Prov-010/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua tanggal 5 Mei 2017, ditetapkan pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) Anies Rasyid Baswedan, Ph.D – Sandiaga Salahuddin Uno, MBA sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Terpilih periode 2017 – 2022.

Jika diurutkan dari masa kemerdekaan Indonesia, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang ke 20. Sampai saat ini, Provinsi DKI Jakarta telah mengalami 18 kali periode kepemimpinan gubernur, dan telah dipimpin oleh 18 orang gubernur yang berbeda.

### **2.3. PERKEMBANGAN DEMOKRASI**

#### **2.3.1. PERKEMBANGAN DEMOKRASI 2009-2018**

Sejak tahun 2010 Indonesia telah mengembangkan pengukuran demokrasi berbasis provinsi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini disusun oleh BPS dan Kemenkopolkham, didukung oleh Bappenas, Kemendagri, dan UNDP. Sejak IDI 2016, UNDP sudah tidak terlibat dalam penyusunan IDI. Metode penyusunan IDI menggunakan pendekatan triangulasi, yang merupakan kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif diperoleh melalui koding koran dan dokumen, sedangkan kualitatif melalui *focus group discussion (FGD)*, dan wawancara mendalam (WM). Indeks yang dihasilkan merupakan indeks provinsi. Sementara itu angka nasional merupakan rata-rata dari indeks provinsi. Aspek yang diukur dalam IDI di antaranya kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Setiap aspek terdiri atas variabel-variabel dan setiap variabel disusun oleh indikator. Aspek kebebasan sipil terdiri dari empat variabel, yaitu (1) kebebasan berkumpul dan berserikat, (2) kebebasan berpendapat, (3) kebebasan berkeyakinan, dan (4) kebebasan dari diskriminasi. Aspek hak-hak politik diturunkan dalam dua variabel, yakni (1) hak memilih dan dipilih serta (2) partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan

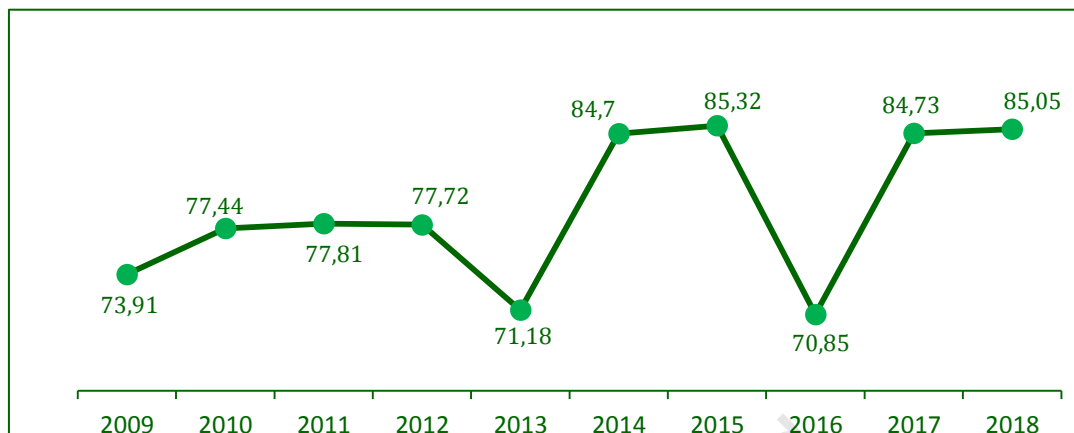
pengawasan. Sementara itu, aspek lembaga demokrasi terdiri dari lima variabel, yaitu (1) pemilihan umum yang bebas dan adil, (2) peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), (3) peran partai politik, (4) peran birokrasi pemerintahan daerah, dan (5) peradilan yang independen. Angka IDI berada dalam skala 0-100 yang kemudian dibagi menjadi tiga kategori, yaitu buruk (indeks < 60), sedang (indeks 60-80), dan baik (indeks >80). Pada tahun 2018, angka IDI mencapai 85,08, termasuk dalam kategori baik.

#### **A. PERKEMBANGAN IDI PROVINSI DKI JAKARTA**

Berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi DKI Jakarta 2018 mencapai angka 85,08 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan 0,35 poin dibandingkan dengan angka IDI Provinsi DKI Jakarta 2017 yang sebesar 84,73. Capaian kinerja demokrasi tersebut sudah berada pada kategori “baik”. Capaian IDI Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2009 hingga 2018 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI sebesar 73,91. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2015 sebesar 85,32. Namun, pada tahun 2016 IDI DKI Jakarta mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 70,85; walaupun pada akhirnya kembali naik secara signifikan juga pada tahun 2017 menjadi 84,73 dan naik kembali pada 2018 menjadi 85,08.

Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Indonesia. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

**Gambar 2.2. Perkembangan IDI Provinsi DKI Jakarta, 2009 -2018**

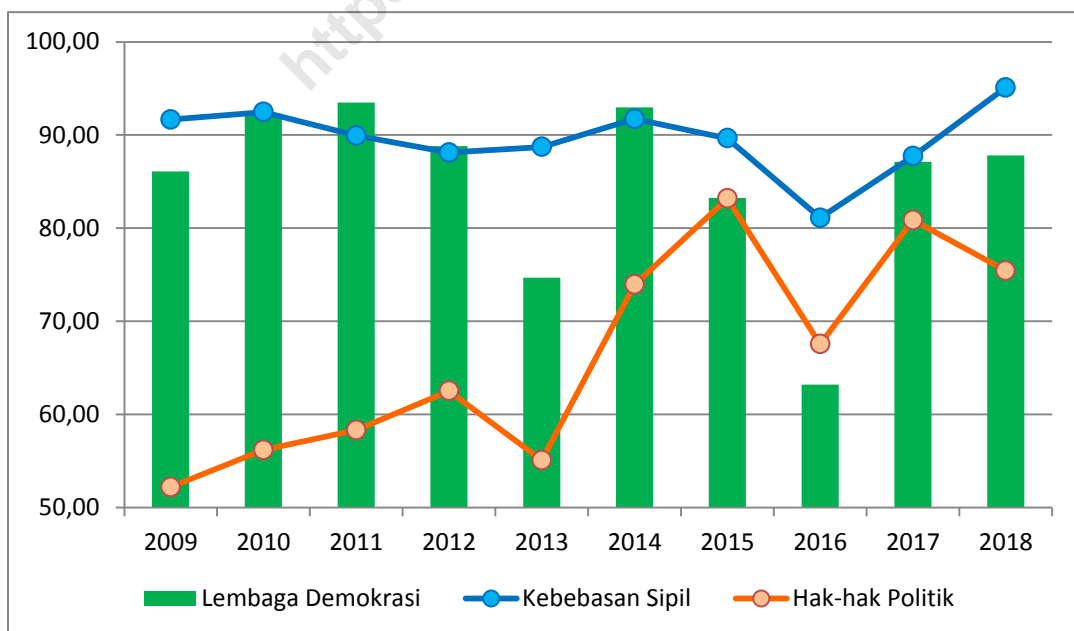


Sumber : Badan Pusat Statistik

### B. PERKEMBANGAN INDEKS ASPEK IDI

Angka IDI Provinsi DKI Jakarta 2018 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai indeks tiga aspek yakni indeks aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 95,09; indeks aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 75,43; dan indeks aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 87,82.

**Gambar 2.3. Perkembangan Aspek IDI, 2009-2018**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2018, indeks aspek Kebebasan Sipil mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2017, yaitu sebesar 7,36 poin (dari 87,73 menjadi 95,09). Sedangkan indeks aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi hanya mengalami sedikit kenaikan yaitu sebesar 0,70 poin (dari 87,12 menjadi 87,82). Sementara itu, indeks aspek Hak-Hak Politik mengalami penurunan signifikan sebesar 5,43 poin (dari 80,86 menjadi 75,43).

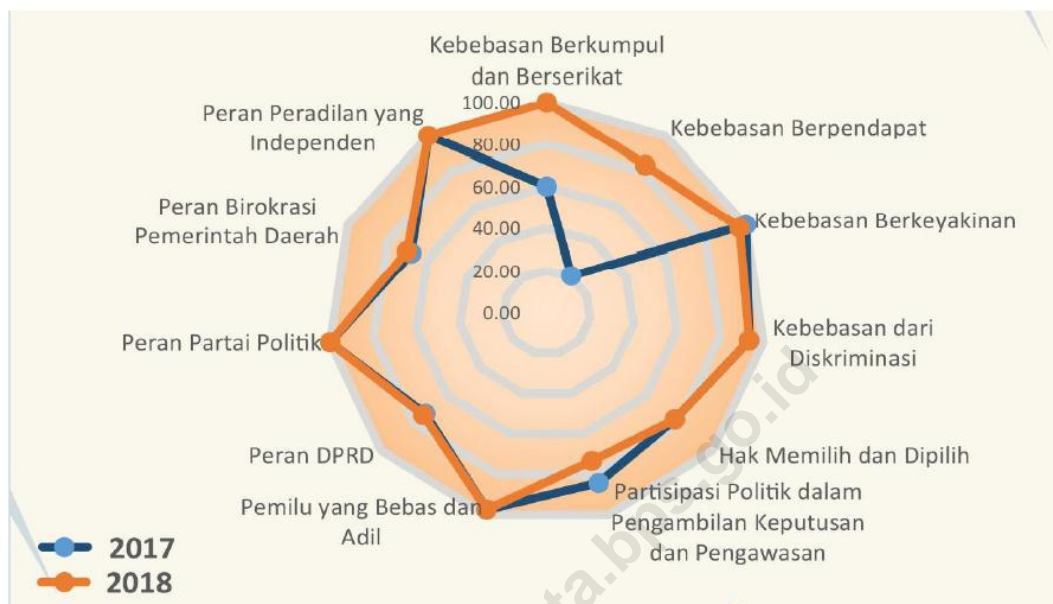
Pada tahun 2018 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”, satu indeks aspek berkategori “sedang” dan dua indeks aspek berkategori “baik”. Indeks aspek Hak-Hak Politik merupakan indeks aspek yang mengalami perpindahan kategori dari kategori “baik” pada 2017 turun menjadi kategori “sedang” pada 2018. Sedangkan dua indeks aspek lainnya tetap berada pada kategori “baik” jika dibandingkan tahun 2017.

### **C. PERKEMBANGAN INDEKS VARIABEL – VARIABEL IDI**

Pada tahun 2018 terdapat dua variabel yang mengalami penurunan indeks, empat variabel yang mengalami peningkatan dan lima variabel yang tidak berubah (tetap). Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan menurun cukup tajam yaitu sebesar 10,87 poin, dari 84,24 pada 2017 menjadi 73,37 pada 2018. Kenaikan terbesar terjadi pada variabel Kebebasan Berpendapat yang naik 62,47 poin, dari 20,83 pada 2017 menjadi 83,30 pada 2018.

Di sisi lain, ada lima variabel yang tidak mengalami perubahan yakni Kebebasan dari Diskriminasi, Hak Memilih dan Dipilih, Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran Partai Politik, dan Peran Peradilan yang Independen. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.4.

**Gambar 2.4. Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi DKI Jakarta, 2017-2018**



Sumber : Badan Pusat Statistik

## 2.3.2. LEMBAGA DEMOKRASI

### A. PARTAI

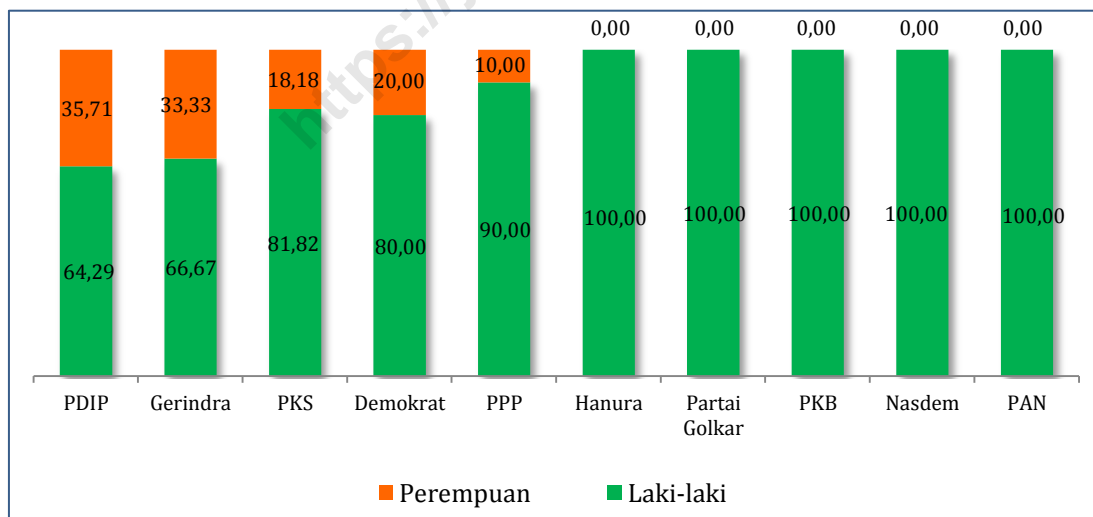
Secara keseluruhan Pemilihan Umum Indonesia tahun 2014 diikuti oleh partai peserta pemilu sebanyak 15 partai, yang terdiri dari 12 partai politik dan 3 partai lokal Aceh. Khusus Pemilu anggota legislatif tersebut di DKI Jakarta hanya diikuti oleh 12 Partai Politik (Gambar 3.2). Tiga partai lokal Aceh yang lain adalah Partai Damai Aceh (PDA), Partai Nasional Aceh (PNA), dan Partai Aceh (PA) dengan nomor urut masing-masing 11, 12, dan 13. Jauh berbeda dengan tahun 2009, pemilu anggota legislatif diikuti oleh 44 Partai Politik.

### B. DPRD

Pemilihan anggota legislatif di Indonesia ini sudah terlaksana 10 kali. Pemilihan anggota legislatif yang terakhir dilakukan serentak di seluruh Indonesia, yaitu tanggal 9 April 2014. Pemilihan anggota legislatif yang dimaksud adalah anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun, khusus Provinsi DKI Jakarta pemilihan hanya DPR dan DPRD Provinsi saja.

Pemilu legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 menghasilkan tiga partai yang memperoleh suara terbanyak untuk anggota legislatif. Tiga partai tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah menetapkan perolehan suara sah partai politik tersebut, serta menetapkan kursi untuk DPRD DKI Jakarta berdasarkan perolehan suara. Berdasarkan penetapan tersebut, jumlah suara sah tercatat sebanyak 4.537.227 suara. Jumlah kursi yang diperebutkan adalah 106 kursi di DPRD DKI Jakarta yang berhasil diisi 10 partai politik. Secara rinci : PDIP (28 kursi), Partai Gerindra (15 kursi), PPP (10 kursi), PKS (11) kursi, Partai Golkar (9 kursi), Partai Demokrat (10 kursi), Partai Hanura (10 kursi), PKB (6 kursi), Partai Nasdem (5 kursi), dan PAN (2 kursi). Komposisi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 2.5.

**Gambar 2.5. Persentase Anggota DPRD Provinsi menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin, Tahun 2017**



Sumber : KPU Provinsi DKI Jakarta

### III. KEAMANAN

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman, yaitu perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Akan tetapi seiring dengan kemajuan zaman, tercipta pula kemunduran-kemunduran yang membentuk suatu kondisi terjadinya kemerosotan lingkungan sosial yang ditandai dengan sering terjadinya tindak kejahatan yang kadang melampaui batas kemanusiaan yang beradab.

Kriminalitas lahir bersamaan dengan lahirnya peradaban manusia di muka bumi ini. Dalam sejarah peradaban manusia, kriminalitas sebagai kejadian pelanggaran hukum yang bersifat pidana merupakan bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat paling dominan. Tingkat kuantitas dan kualitas kriminal juga searah dengan kemajuan peradaban manusia, semakin maju peradaban manusia, semakin meningkat pula jenis dan modus operandi tindak kejahatan. Dengan semakin meningkatnya teknologi, kejahatan juga semakin marak dilakukan dengan menggunakan alat-alat berteknologi tinggi dan menggunakan jaringan telekomunikasi dan dilakukan cukup dengan duduk di belakang layar komputer.

#### 3.1 TINDAK KEJAHATAN

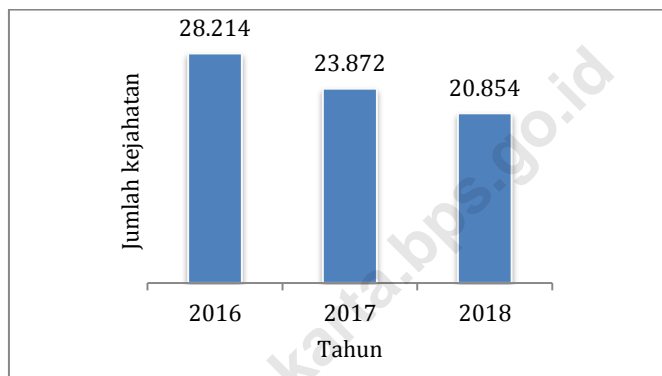
Tindak kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja/tidak, telah terjadi/baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta, benda, kehormatan dan lainnya serta tindakan tersebut dapat diancam hukuman penjara/kurungan. Tindak kejahatan mencakup pencurian, penipuan, penganiayaan, dan sebagainya.

##### 3.1.1 SUMBER DATA KEPOLISIAN

Data registrasi Polri menggambarkan situasi keamanan berdasarkan pencatatan kejadian kejahatan yang dilaporkan masyarakat atau kejadian yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi.

Jumlah kejahatan dalam publikasi ini merupakan seluruh kejahatan yang tercatat di Polda Metro Jaya. Jumlah kejahatan di tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah kejahatan di tahun 2017 dan tahun 2016. Hal ini tentunya sesuai dengan harapan semua masyarakat. Jumlah kejahatan selama tahun 2016 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 3.1.

**Gambar 3.1. Jumlah Kejahatan yang tercatat,  
Tahun 2016-2018**



Sumber: Simonpolkam, 2018

Jumlah orang yang terkena tindak kejahatan (*crime rate*) tiap 100.000 penduduk juga mengalami penurunan, pada tahun 2018 diperkirakan sebanyak 199 orang. Angka ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2017 yang sebesar 230 orang. *Crime rate* merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu.

Jumlah kejahatan yang diselesaikan merupakan jumlah seluruh kejahatan yang diselesaikan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya. Jumlah kejahatan yang diselesaikan oleh polisi (*Crime Cleared*) selama tahun 2017-2018 menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini memberikan indikasi semakin profesionalnya kepolisian dalam menyelesaikan perkara.

Jumlah kejahatan yang diselesaikan selama tahun 2018 adalah sebanyak 20.854 kasus, atau sebesar 93,18 persen dari total kejahatan yang tercatat. Tahun 2017 sebesar 82,12 persen dari total kejahatan yang tercatat.



Berdasarkan jenisnya, kasus narkoba merupakan tindak kejahatan yang paling banyak tercatat di DKI Jakarta, yaitu sebanyak 9.128 kasus pada tahun 2018. Jenis tindak kejahatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1. Lima Jenis Tindak Kejahatan yang yang Paling banyak Tercatat, Tahun 2018**

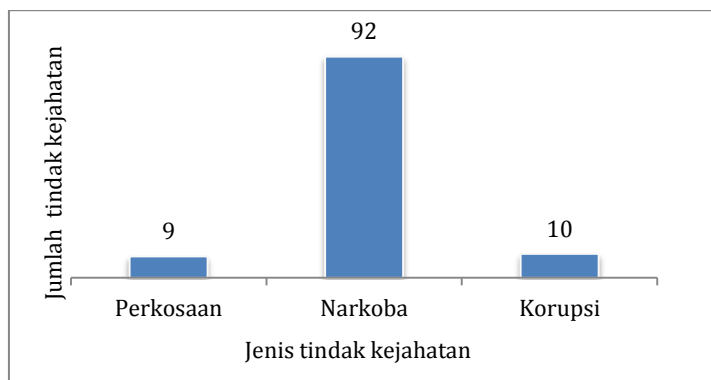
Jenis Kejahatan Tercatat	Jumlah
(1)	(2)
Pencurian dengan pemberatan	2.704
Pencurian kendaraan bermotor	1.736
Penggelapan	2.818
Penipuan	1.577
Narkotika	9.128

Sumber: Simonpolkam, 2018

### 3.1.2 SUMBER DATA PODES

Data Podes menggambarkan situasi keamanan di wilayah desa/kelurahan yang bersumber dari keterangan kepala desa/lurah. Sejalan dengan catatan administrasi Polri, data Podes 2018 menunjukkan tindak kejahatan yang paling banyak terjadi adalah penyalahgunaan/peredaran narkoba. Sebanyak 92 kelurahan mengalami tindak kejahatan ini.

**Gambar 3.2. Jumlah Tindak Kejahatan di Kelurahan yang tercatat, Tahun 2018**



Sumber: PODES, 2018

Sebanyak 10 kelurahan mengalami tindak kejahatan korupsi. Akan tetapi, penilaian masyarakat mengenai tindak kejahatan korupsi relatif cenderung menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya.

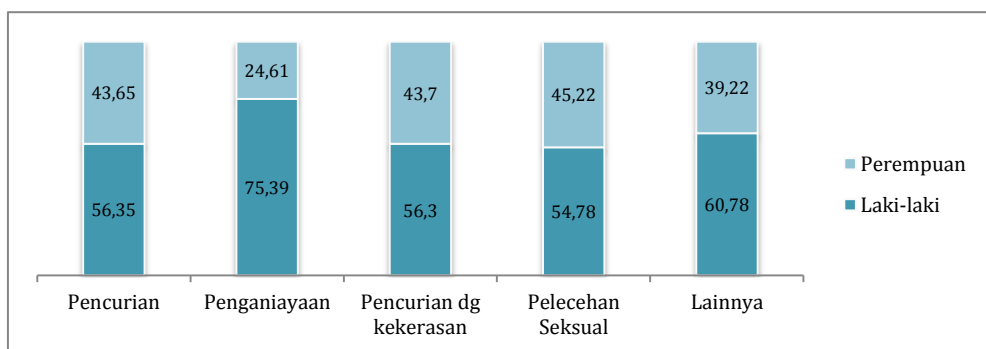
### 3.2 KORBAN KEJAHATAN (Sumber Data: SUSENAS, Maret 2018)

Subbab ini menyajikan gambaran umum mengenai kejahatan dengan pendekatan korban. Data yang ditampilkan merupakan jumlah dan karakteristik korban kejahatan dan kejadian kejahatan yang dialami setahun yang lalu. Data yang disajikan berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) periode Maret 2018.

Korban kejahatan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan. Penduduk DKI Jakarta yang pernah menjadi korban kejahatan selama setahun terakhir sebanyak 1,1 persen. Berdasarkan komposisinya, penduduk yang lebih sering menjadi korban kejahatan merupakan laki-laki, yaitu sebesar 57,15 persen. Sementara berdasarkan usianya, penduduk yang menjadi korban kejahatan rata-rata berusia 37 tahun.

Berdasarkan jenisnya, tindak kejahatan yang paling sering dialami korban adalah pencurian, yaitu sebanyak 73,48 persen. Sementara korban yang mengalami tindak penganiayaan sebesar 3,99 persen. Fenomena yang menarik adalah 75,39 persen korban penganiayaan berjenis kelamin laki-laki. Bentuk kejahatan penganiayaan bisa berupa pemukulan, penamparan dan pengeroyokan.

**Gambar 3.3. Persentase Jenis Kelamin Korban Kejahatan menurut Tindak Kejahatan, Tahun 2018**



Sumber : Susenas 2018

Penduduk yang menjadi korban kejahatan lainnya ada sebanyak 18,61 persen. Korban yang mengalami tindak kejahatan lainnya adalah korban yang mengalami penculikan, pemerasan, penipuan atau pengrusakan barang.

### 3.3 KONFLIK/PERKELAHIAN MASSAL

Perkelahian massal adalah perkelahian yang terjadi secara massal melibatkan banyak pelaku antara lain: antar kelompok masyarakat, antar pelajar, antar suku, atau lainnya yang terjadi di desa selama setahun terakhir.

**Tabel 3.2. Banyaknya Kelurahan yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal dan Kecenderungan Kategori Korban, Tahun 2018**

Jenis perkelahian massal	Jumlah Kelurahan	Jenis Korban	
		Meninggal	Luka-luka
(1)	(2)	(3)	(4)
Antar kelompok masyarakat	57	5	3
Kelompok masyarakat antar kelurahan	34	45	39
Pelajar/mahasiswa	33	7	1

Sumber : PODES 2018

Perkelahian antar kelompok masyarakat merupakan jenis konflik yang paling sering terjadi. Berdasarkan Tabel 3.2, sebanyak 57 kelurahan atau sebesar 21,35 persen mengalami jenis konflik ini.

Pemerintah menyadari kerawanan konflik di Indonesia dapat menciptakan perpecahan. Oleh karena itu sebagai upaya menanggulangi isu konflik pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No.7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Dalam Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa pemerintah berperan aktif dalam setiap penyelesaian bentuk konflik atau benturan fisik dan kekerasan lainnya yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan ulasan yang disajikan pada publikasi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap pentingnya politik di DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan mengingat belum semua warga yang punya hak pilih menggunakan hak pilihnya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi warga yang punya hak pilih (*voters turn out*) Pemilihan Gubernur (Pilgub) putaran I sebesar 77,10 persen dan turun 0,02 persen pada Pilgub Putaran II menjadi 77,08 persen.
2. Dalam hal perkembangan demokrasi yang diukur melalui capaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menunjukkan adanya sedikit peningkatan dari tahun 2017 (84,73) menjadi 85,05 tahun 2018. Nilai ini tertinggi dibandingkan 34 propinsi lain di Indonesia. Ini menandakan bahwa Jakarta dengan kedudukannya sebagai ibukota negara tetap dapat mempertahankan kondusifitas wilayahnya yang berimplikasi pada terlaksananya pembangunan nasional.
3. Dalam hal keamanan yang diukur oleh Kepolisian melalui *crime rate* menunjukkan adanya penurunan jumlah korban kejahatan dari 230 orang tahun 2017 menjadi 199 orang pada tahun 2018. Untuk jenis kejahatan yang terbanyak adalah kejahatan pencurian.
4. Dari sisi korban yang mengalami kejahatan, jika dilihat berdasarkan data Susenas 2018, menunjukkan bahwa 1,1 persen dari penduduk DKI Jakarta menjadi korban kejahatan selama setahun terakhir dengan kejahatan yang terbanyak adalah pencurian (73,48 %).

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jl. Salemba Tengah No. 36 – 38 Jakarta 10440